



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOBA**

Jl. A.B. Silalahi
Komplek Perkantoran Simanjalo
Email :
bpbdtobasa2016@gmail.com



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40
BAB V. PENUTUP	47
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana. Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Sektor Swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Toba.

Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penanggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Toba dan

sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdiri dari 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1). Politik, (2). Teknokratik (3). Partisipatif dan (4) atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom-up). Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Penyusunan rencana, (2) Penetapan rencana, (3) Pengendalian pelaksanaan rencana, (4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja juga memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Rencana Kerja, perangkat daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program perangkat daerah lainnya.

Tahapan penyusunan Renja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba merupakan dokumen Rencana Pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor ...);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
30. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Toba Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan yang sistematis dalam pencapaian sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat;
2. Menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
3. Merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Toba.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2026 adalah:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Toba;
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terintegrasi, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Toba dalam RPJMD 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 memiliki sistematika penyusunan yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penggulangan
Bencana Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Penggulangan Bencana Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Pagu renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 sebesar Rp. 4.052.861.704,00. Anggaran tersebut untuk membiayai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 3.518.781.554,00 dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 534.080.150,00. Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba melaksanakan 2 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.052.861.704,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.920.879.244,00 (96,74%).

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan

dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025 – 2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana adalah satu satunya program utama yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba. Adapun indikator kinerja dari Program Penanggulangan Bencana adalah Persentase Penanggulangan Bencana, dengan capaian indikator pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%. Persentase penanggulangan bencana diperoleh dari jumlah penanggulangan bencana yang berhasil ditangani dibagi jumlah bencana yang terjadi dikali 100%.

Sepanjang tahun 2024, terdapat 33 bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Toba, yang terdiri dari bencana angin puting beliung sebanyak 5 kejadian, kebakaran sebanyak 24 kejadian (9 kejadian kebakaran hutan dan 15 kejadian kebakaran rumah, dan tenggelam sebanyak 4 kejadian. Dari 33 kejadian bencana tersebut, seluruh kejadian bencana berhasil ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba, melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak. 33 kejadian bencana yang berhasil ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jenis Bencana				Jumlah
		Kebakaran		Angin Puting Beliung	Tenggelam	
		Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan			
1	Balige	4	5	1	1	11
2	Tampahan	0	3	0	0	3
3	Laguboti	2	0	1	0	3
4	Habinsaran	0	0	0	0	0
5	Borbor	0	1	0	0	1
6	Nassau	0	0	0	0	0
7	Silaen	2	0	0	0	2
8	Sigumpar	0	0	0	1	1
9	Porsea	2	0	0	1	3
10	Pintu Pohan Meranti	1	0	0	1	2
11	Siantar Narumonda	0	0	1	0	1
12	Parmaksian	2	0	2	0	4
13	Lumban Julu	0	0	0	0	0
4	Uluan	1	0	0	0	1
15	Ajibata	0	0	0	0	0
16	Bonatua Lunasi	1	0	0	0	1
Jumlah		15	9	5	4	33

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2024 memiliki 4 kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan indikator kinerja persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target capaian 100% dan realisasi 100%. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana diperoleh dari 150 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi 150 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%.

Layanan informasi rawan bencana berupa Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana. Pelayanan Informasi Rawan Bencana memiliki 1 sub kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana). Pada tahun 2024, sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan target 150 orang dan realisasi 150 orang (100%).

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator kinerja Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, memiliki target capaian 100% dengan realisasi 15,42%. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan diperoleh dari 500 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi 3.242 jiwa jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%.

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berupa Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana memiliki 7 sub kegiatan yaitu Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penyusunan Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, serta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 sub kegiatan Penguatan

Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan target kinerja 3 kawasan dan realisasi 3 kawasan (100%) dan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota dengan target kinerja 3 kawasan dan realisasi 3 kawasan (100%). Sementara sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, serta Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota tidak terealisasi /tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator kinerja Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, memiliki target capaian 100% dengan realisasi 100%. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dari 167 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi 167 jiwa jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100%.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berupa Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana memiliki 3 sub kegiatan yaitu Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, serta Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pada tahun 2024 sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100 orang dan realisasi 167 orang (167%). Sementara Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, serta Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana memiliki target capaian 100% dan realisasi 33,33%. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota, Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Capaian Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana rendah karena sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan tidak ditampung dalam penganggaran. Pada tahun 2024 sub kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan target kinerja 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan (100%).

Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana merupakan kegiatan penerapan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. Berikut realisasi capaiannya:

No.	Kecamatan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	Balige	0	0	27
2	Tampahan	0	0	0
3	Laguboti	0	0	12
4	Habinsaran	0	0	0
5	Borbor	0	0	0
6	Nassau	0	0	0
7	Silaen	50	200	8
8	Sigumpar	50	150	1
9	Porsea	0	0	18
10	Pintu Pohan Meranti	0	0	12
11	Siantar Narumonda	50	150	23
12	Parmaksian	0	0	41
13	Lumban Julu	0	0	0
14	Uluan	0	0	6
15	Ajibata	0	0	0
16	Bonatua Lunasi	0	0	19
	Jumlah	150	500	167

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba. Adapun indikator kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Berdasarkan evaluasi renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2024 capaian indikator Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar 69,44% dari target kinerja sebesar 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 69,44%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 memiliki 6 kegiatan yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah memiliki target capaian 100% dan realisasi 50%. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada tahun 2024 sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 6 dokumen dan realisasi 6 dokumen (100%). Sementara sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan memiliki target capaian 100% dan realisasi 100%. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 32 orang/bulan dan realisasi 32 orang/bulan (100%).

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum memiliki target capaian 100% dan realisasi 100%. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 6 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada tahun 2024 semua sub kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki realisasi capaian 100%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur memiliki target capaian 100% dan realisasi 0%. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pada tahun 2024 sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur memiliki target capaian 100% dan realisasi 100%. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pada tahun 2024 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki realisasi capaian 100%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara memiliki target capaian 100%

dan realisasi 66,67%. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pada tahun 2024 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki realisasi capaian 100%. Sementara sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

Realisasi program/kegiatan yang tidak/ kurang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 69,44% dari realisasi 69,44% dengan target 100%. Hal ini karena adanya kegiatan yang tidak terealisasi (0%) yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran. Selain itu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah hanya memiliki realisasi 50% dikarenakan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran. Selain itu, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah juga hanya memiliki realisasi 66,67% dikarenakan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana karena tidak ditampung pada penganggaran.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase capaian kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 15,42% dari realisasi hanya 15,42% dengan target 100%. Hal ini karena belum adanya dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Toba sebagai acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Persentase capaian kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 33,33% dari realisasi hanya 33,33% dengan target 100%. Hal ini karena sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan tidak ditampung dalam penganggaran.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana

Realisasi capaian kinerja Program Penanggulangan Bencana 100%. Pada tahun 2024 ada 33 jumlah penanggulangan bencana yang berhasil ditangani dari 33 jumlah bencana yang terjadi.

2. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Realisasi capaian kinerja kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100%. Pada tahun 2024 sebanyak 150 jiwa jumlah

warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana berupa Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dari 150 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan (target renja).

3. *Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*
Realisasi capaian kinerja kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100%. Pada tahun 2024 sebanyak 167 jiwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari 167 jiwa jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.

4. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
Realisasi capaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%. Pada tahun 2024 sebanyak 32 orang yang menerima layanan administrasi keuangan berupa gaji dan tunjangan ASN dari 32 target yang ditetapkan.

5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Realisasi capaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%. Pada tahun 2024 seluruh layanan administrasi umum terealisasi.

6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Realisasi capaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%. Pada tahun 2024 seluruh jasa penunjang kinerja aparatur terealisasi.

Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah Persentase Penanggulangan Bencana sebesar 100% dan Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 14,24%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Tahun 2024 dituangkan pada lampiran Tabel T-C.29 berikut (terlampir).

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Toba

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program, Kegiatan sesuai Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.567.675.064		7.886.319.464		3.912.861.704		3.920.879.244		100,2%		5.060.769.000		16.867.967.708		51,79%
1	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			32.567.675.064		7.886.319.464		3.912.861.704		3.920.879.244		100,2%		5.060.769.000		16.867.967.708		51,79%
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	9.938.306.754	100%	1.686.376.309	100%	434.080.150	100%	521.858.155	100%	120,22%	100%	1.160.000.000	100%	3.368.234.464	100%	33,89%
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	775.895.845	98,7%	70.984.500	100%	-	100%	-	100%	0%	100%	325.000.000	0%	395.984.500	0%	51,04%
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	5.482.410.909	70,02%	526.282.950	100%	280.071.633	15,42%	278.441.065	15,42%	99,42%	100%	400.000.000	0%	1.204.724.015	0%	21,97%
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2.300.000.000	100%	969.820.795	100%	113.998.517	100%	203.417.090	100%	178,44%	100%	350.000.000	100%	1.523.237.885	100%	66,23%
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	1.380.000.000	100%	119.288.064	100%	40.010.000	33,33%	40.000.000	33,33%	99,98%	100%	85.000.000	8,33%	244.288.064	8,33%	17,70%
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	22.629.368.310	91,67%	6.199.943.155	100%	3.478.781.554	69,44%	3.399.021.089	69,44%	97,71%	100%	3.900.769.000	14,24%	13.499.733.244	14,24%	59,66%
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	500.000.000	100%	19.174.303	100%	11.374.170	50%	11.374.170	50%	100%	100%	25.000.000	16,67%	55.548.473	16,67%	11,11%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program, Kegiatan sesuai Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	15.000.000.000	100%	3.999.732.248	100%	2.738.874.500	100%	2.631.573.627	100%	96,08%	100%	3.131.769.000	25%	9.763.074.875	25%	65,09%
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	1.700.000.000	100%	524.315.465	100%	278.460.408	100%	278.080.571	100%	99,86%	100%	215.000.000	10,42%	1.017.396.036	10,42%	59,85%
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	951.921.112	50%	152.585.860	100%	-	0%	-	0%	0%	100%	25.000.000	0%	177.585.860	0%	18,66%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	3.450.000.000	100%	875.007.578	100%	245.480.000	100%	274.259.850	100%	111,72%	100%	252.000.000	25%	1.401.267.428	25%	40,62%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	1.027.447.198	100%	629.127.701	100%	204.592.476	66,67%	203.732.871	66,67%	99,58%	100%	252.000.000	8,33%	1.084.860.572	8,33%	105,59%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Risiko Bencana

Persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 107,2 (risiko sedang) dari target 107,2. Nilai Indeks Risiko Bencana tersaji dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Dimana risk adalah risiko; hazard adalah bahaya; vulnerability adalah kerentanan; dan capacity adalah kapasitas. Komponen bahaya yang diperhitungkan adalah 9 (sembilan) potensi bencana meliputi gempabumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim dan abrasi. Komponen kerentanan mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas mencakup tujuh indikator ketahanan daerah yang terdiri dari kebijakan dan kelembagaan; kajian dan perencanaan; sistem informasi; tematik kawasan rawan bencana; efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan sistem pemulihan bencana. Kapasitas menjadi komponen utama yang mempengaruhi perubahan nilai IRB. Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
367	KOTA TOMOHON	SULAWESI UTARA	111.55	SEDANG
368	SUMBA TENGAH	NUSA TENGGARA TIMUR	111.45	SEDANG
369	KOTA CILEGON	BANTEN	111.01	SEDANG
370	KARANGASEM	BALI	110.78	SEDANG
371	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	110.42	SEDANG
372	KARO	SUMATERA UTARA	110.22	SEDANG
373	TRENGGALEK	JAWA TIMUR	109.65	SEDANG
374	BANYUMAS	JAWA TENGAH	109.01	SEDANG
375	ROTE NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR	108.99	SEDANG
376	MAJALENGKA	JAWA BARAT	108.99	SEDANG
377	BENER MERIAH	ACEH	108.97	SEDANG
378	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	108.89	SEDANG
379	NGAWI	JAWA TIMUR	108.61	SEDANG
380	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	108.40	SEDANG
381	DEIYAI	PAPUA TENGAH	108.40	SEDANG
382	BANDUNG BARAT	JAWA BARAT	108.28	SEDANG
383	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	108.01	SEDANG
384	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	107.81	SEDANG
385	BARITO TIMUR	KALIMANTAN TENGAH	107.61	SEDANG
386	KOTA TANJUNG BALAI	SUMATERA UTARA	107.26	SEDANG
387	LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	107.22	SEDANG
388	TOBA	SUMATERA UTARA	107.20	SEDANG

Sumber: Buku IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) BNPB Tahun 2024

2. Indikator jumlah SDM/ masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana

Persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dari realisasi sebanyak 500 orang masyarakat yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dengan target 500 orang masyarakat yang akan mengikuti pelatihan penanggulangan bencana. Pelatihan penanggulangan bencana dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana Tahun 2024
1	Silaen	200
2	Sigumpar	150
3	Siantar Narumonda	150
	Jumlah	500

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

3. Indikator persentase kejadian bencana yang tertangani

Persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dari realisasi 33 penanganan kejadian bencana dengan 33 jumlah kejadian bencana. Daftar kejadian bencana pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Kejadian Bencana	Tanggal Kejadian	Waktu Kejadian	Waktu Kejadian Diterima	Lokasi Kejadian
1	Kebakaran Rumah	04 Januari 2024	16.00 WIB	18.00 WIB	Desa Amborgang Kec. Porsea
2	Kebakaran Rumah	30 Januari 2024	11.00 WIB	11.26 WIB	Desa Paindoan Kec. Balige
3	Kebakaran Rumah	31 Januari 2024	12.00 WIB	13.00 WIB	Dolok Nauli, Dusun I, Desa Silamosik I Kec. Porsea
4	Angin Puting Beliung	22 Februari 2024	20.00 WIB	23 Februari 2023	Desa Siantar Utara Kec. Parmaksian
5	Kebakaran Rumah	28 Februari 2024	03.00 WIB	08.00 WIB	Desa Sinta Dame Kec. Silaen
6	Kebakaran Hutan	13 April 2024	14.30 WIB	14. 45 WIB	Tangga Batu Barat Sipintu-Pintu Kec. Tampahan
7	Kebakaran Rumah	08 Mei 2024	12.00 WIB	12.30 WIB	Kelurahan Pardede Onan Kec. Balige
8	Kebakaran Rumah	22 Mei 2024	07.00 WIB	13.30 WIB	Lumban Binanga Kec. Laguboti
9	Angin Puting Beliung	29 Mei 2024	14.30 WIB	15.00 WIB	Desa Simatibung Kec. Laguboti
10	Tenggelam	18 Juni 2024	13.00 WIB	17.00 WIB	Desa Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti
11	Tenggelam	20 Juni 2024	15.00 WIB	17.30 WIB	Kelurahan Pasar Porsea Kec. Porsea
12	Angin Puting Beliung	21 Juni 2024	17.00 WIB	18. 10 WIB	Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan Kec. Balige
13	Kabakaran Rumah	28 Juni 2024	19.05 WIB	19.15 WIB	Desa Sianipar Sihail-Hail Kec. Balige
14	Kebakaran Rumah	03 Juli 2024	17.00 WIB	18.15 WIB	Desa Partoruan Janji Matogu Kec. Uluan
15	Kebakaran Hutan	04 Juli 2024	18.41 WIB	19.05 WIB	Desa Hutagaol Peatalun Kec. Balige
16	Kebakaran Rumah	09 Juli 2024	09 Juli 2024	16 Juli 2024	Desa Natolutali Kec. Silaen
17	Kebakaran Hutan	22 Juli 2024	14. 30 WIB	14.35 WIB	Desa Sianipar Sihail-Hail Kec. Balige

No.	Nama Kejadian Bencana	Tanggal Kejadian	Waktu Kejadian	Waktu Kejadian Diterima	Lokasi Kejadian
18	Kebakaran Hutan	23 Juli 2024	15. 30 WIB	16.00 WIB	Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan
19	Kebakaran Hutan	24 Juli 2024	12.00 WIB	12. 50 WIB	Desa Lumban Silintong Pemandian Ujung (Bukit Pahoda) Kec. Balige
20	Kebakaran Hutan	24 Juli 2024	16.00 WIB	16. 30 WIB	Desa Lumban Silintong Dusun IV Kec. Balige
21	Angin Puting Beliung	24 Juli 2024	20.00 WIB	20.30 WIB	Sosor Sihobuk Jl. Parbulu Desa Pangombusan Kec. Parmaksian
22	Kebakaran Hutan	25 Juli 2024	15.20 WIB	15. 45 WIB	Desa Gurgur Aek Raja Kec. Tampahan
23	Kebakaran Hutan	26 Juli 2024	13.00 WIB	16. 20 WIB	Desa Aek Unsim Kec. Borbor
24	Kebakaran Hutan	27 Juli 2024	19.15 WIB	19.30 WIB	Dusun IV Sosr Dolok Desa Hutagaol Peatalun Kec. Balige
25	Kebakaran Rumah	07 Agustus 2024	08. 00 WIB	10.25 WIB	Dudun I Desa Ambar Halim Kec. Pintu Pohan
26	Angin Puting Beliung	08 Agustus 2024	15.00 WIB	17.30 WIB	Desa Narumonda VII Dan Desa Narumonda VIII Kec. Siantar Narumonda
27	Kebakaran Rumah	03 September 2024	14.20 WIB	16.30 WIB	Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian
28	Kebakaran Rumah	14 September 2024	23.30 WIB	02.15 WIB	Desa Silombu Dusun II Sosor Saba Kec. Bonatua Lunasi
29	Kebakaran Rumah	08 Oktober 2024	12.00 WIB	12.30 WIB	Desa Lumban Pea Timur Kec. Balige
30	Tenggelam	25 Oktober 2024	23.00 WIB	26 Oktober 2024	Kel. Sigumpar Dangsinia Kec. Sigumpar
31	Tenggelam	30 Oktober 2024	16.00 WIB	31 Oktober 2024	Desa Sibolahotang Kec. Balige
32	Kebakaran Rumah	07 Desember 2024	13.20 WIB	13.30 WIB	Dusun 2 Desa Pangombusan Kec. Parmaksian
33	Kebakaran Rumah	15 Desember 2024	19.30 WIB	20.00 WIB	Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

4. *Indikator persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan*

Persentase capaian tahun 2024 adalah 96,67% dari realisasi 30 jumlah rencana rehab rekons dengan 29 jumlah pelaksanaan rehab rekons, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1	Balige	7	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan oleh OPD sesuai disposisi Bupati.
2	Tampahan	1	
3	Laguboti	4	
4	Habinsaran	0	
5	Borbor	0	
6	Nassau	3	
7	Silaen	5	
8	Sigumpar	1	
9	Porsea	0	
10	Pintu Pohan Meranti	0	
11	Siantar Narumonda	0	
12	Parmaksian	2	
13	Lumban Julu	1	
14	Uluan	3	
15	Ajibata	2	
16	Bonatua Lunasi	0	
	Jumlah	29	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

5. *Indikator Persentase Penanggulangan Bencana*

Persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dari 33 jumlah penanggulangan bencana yang berhasil ditangani dengan 33 jumlah bencana yang terjadi.

6. *Indikator Cakupan Kinerja Urusan Pemerintah Daerah*

Persentase capaian tahun 2024 adalah 69,44%.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dituangkan pada lampiran Tabel T-C.30 berikut (terlampir).

Lampiran II

TABEL T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toba

No	Indikator		Satuan Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
a	Indikator Tujuan :															
	1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Standar Nasional		107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,15	
b	Indikator Sasaran :															
	1	Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Orang	SPM	IKK	350	350	500	150	150	3	270	500	125	150	
	2	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Persen	SPM	IKK	100	100	100	100	100	94	100	100	100	100	
	3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	Persen			100	100	100	100	100	81	100	96,67	100	100	
c	Indikator Program/ Kegiatan :															
	I	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	SPM	IKK	100	100	100	100	100	70	98,70	100	100	100	
	2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	SPM	IKK	100	100	100	100	100	70	70,02	15,42	100	100	
	3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	4	Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen			100	100	100	100	100	0	100	33,33	100	100	
	II	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			100	100	100	100	100	66,38	91,67	69,44	100	100	
	1	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100	100	100	100	100	50	100	50	100	100	
	2	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen			100	100	100	100	100	79,55	100	100	100	100	
	4	Persentase Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen			100	100	100	100	100	0	50	0	100	100	
	5	Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	6	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen			100	100	100	100	100	68,75	100	66,67	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu penting didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pra bencana

Fokus pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini meliputi pemetaan dan pemantauan, sosialisasi dan edukasi, Sistem Peringatan Dini, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan bencana.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

Membangun kapabilitas institusi dan aparatur dalam manajemen bencana meliputi penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat tanggap darurat

Memastikan kesiapan dalam menghadapi bencana dan memberikan respons yang cepat dan efektif meliputi perencanaan berbasis risiko, dan peningkatan tanggap darurat.

4. Ketahanan masyarakat dan budaya sadar bencana

Mendorong masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam pengurangan risiko dan peningkatan ketahanan meliputi pemberdayaan masyarakat.

5. Penanganan bencana harus menjadi urusan bersama (pentahelix)

Penanganan bencana harus menjadi urusan bersama melalui pendekatan pentahelix karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menanganinya secara mandiri, dan kolaborasi lima elemen pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan. Faktor Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) disajikan pada tabel berikut:

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKTERNAL
KEKUATAN (<i>STRENGTH</i> = S)	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i> = O)
a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu penanggulangan bencana
b. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	b. Dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
c. Tersedianya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Toba	c. Peningkatan akses teknologi dan informasi terkait penanggulangan bencana
d. Memiliki hubungan koordinasi yang baik dengan instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya	d. Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota tetangga dalam menghadapi bencana lintas batas daerah
KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i> = W)	TANTANGAN (<i>THREATS</i> = T)
a. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	a. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim
b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	b. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana

c. Belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi	c. Terbatasnya infrastruktur dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang belum tersedia secara menyeluruh	d. Keterbatasan akses teknologi dan informasi terkait penanggulangan bencana
e. Terbatasnya anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi, sehingga program penanggulangan bencana tidak berjalan optimal	e. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Toba perlu dilakukan yaitu dengan membandingkan program/ kegiatan pada rancangan awal dengan kebutuhan program/ kegiatan SKPD tahun 2026. Dari hasil analisis ini dapat dilakukan perubahan-perubahan terhadap rancangan awal RKPD dengan mempertimbangkan program/ kegiatan yang sifatnya mendesak dan juga anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2026, tidak ada perbedaan hasil analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Berikut rincian Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 seperti terdapat pada lampiran Tabel T-C. 31 berikut (terlampir).

TABEL T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Toba

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.795.891.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.795.891.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	8.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.146.781.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.146.781.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	3.146.781.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	3.146.781.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen	188.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen	188.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen	233.280.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen	233.280.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.280.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.280.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	219.830.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	219.830.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	214.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	214.830.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.000.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat, Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persen	378.990.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat, Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persen	378.990.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100 Persen	175.720.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100 Persen	175.720.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	50.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan	25.720.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan	25.720.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	103.270.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	103.270.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	53.270.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	53.270.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	50.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	50.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	50.000.000	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	20 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	20 Kegiatan	50.000.000	
Jumlah					4.174.881.000	Jumlah					4.174.881.000

2.5. Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada saat ini peran serta masyarakat melalui kepala desa/lurah hanya sebatas melaporkan kejadian bencana/musibah yang terjadi.

Pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten belum ada usul atau masukan dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan disajikan pada lampiran Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*).

Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) merupakan dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. Rencana Nasional

Penanggulangan Bencana (RENAS PB) meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak dan pengendalian ancaman bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) merupakan acuan dan sebagai input dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana.

Dalam rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029, dirumuskan bahwa tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia adalah *“Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan.”* Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun kerangka regulasi serta tujuan perencanaan di Indonesia yang tidak hanya memiliki tujuan pengelolaan risiko bencana dan membangun ketangguhan, namun juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan.

Kemudian tujuan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2025-2029 ini diturunkan ke dalam 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana, yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana melalui peningkatan kualitas kesiapsiagaan, peringatan dini, dan

- penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Mengurangi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana melalui peningkatan efektivitas upaya pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan iklim;
 3. Meningkatkan daya lenting di daerah terdampak melalui peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola dan kolaborasi multipihak.

Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2025-2029, kebijakan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dilakukan melalui strategi-strategi yang menjadi upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana 2025-2029. Kebijakan dan strategi-strategi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan ada 6 (enam) ialah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif
Kebijakan ini dilakukan melalui membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu (sinkron) dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana. Pembangunan sistem regulasi, seperti peraturan perundangundangan dan NSPK, dilakukan dengan penguatan regulasi yang telah ada maupun penyusunan regulasi baru untuk mendukung optimasi kinerja sistem penanggulangan bencana. Selain itu, pembangunan sistem regulasi juga dilakukan dengan pengarusutamaan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dalam rencana tata ruang, dan rencana pembangunan.
2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana
Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan bencana; (b) meningkatkan

ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan; (c) mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana; (d) meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana, dan (e) meningkatkan advokasi Resiliensi Berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Kebijakan ini juga dilakukan dengan memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam pelaksanaan strategi di kebijakan lainnya, seperti untuk membangun ketangguhan masyarakat, menanggulangi kedaruratan bencana, melakukan pencegahan, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim, juga mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana

Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan aksesibilitas layanan dan efektivitas pengelolaan sistem peringatan dini; (b) meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim; (c) meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim; (d) meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan dan keandalan bangunan gedung; (e) meningkatkan perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana; dan (f) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan industrialisasi kebencanaan.

4. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana

Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan keterbukaan data dan informasi untuk ketangguhan masyarakat & lembaga usaha; (b) meningkatkan pemanfaatan skema perlindungan aset dan transfer risiko bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha; dan (c) meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan

Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana; dan (b) meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.

6. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana; dan (b) meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Toba untuk periode tahun 2025-2029 adalah:

“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. MISI 1 Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;
2. MISI 2 Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata;
3. MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;
4. MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat;

5. MISI 5 Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
6. MISI 6 Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan ke 6 (enam) misi di atas, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba termasuk dalam misi ke 5 (lima) yaitu ***Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban***. Dari misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba termasuk dalam meningkatkan cakupan pelayanan pencegahan dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Toba. Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dicirikan oleh indikator *outcome* yaitu meningkatnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan meningkatnya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Penanggulangan Bencana.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba:

- Tujuan : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.***
Sasaran : 1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
2. Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana;
3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berikut rincian indikator dan target kinerja tujuan dan target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
		1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persen	15,42	100	100	100	100
		2. Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100
		3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba hanya memiliki 1 (satu) program utama dan 1 (satu) program pendukung pada tahun 2026 yakni:

1. Program Penanggulangan Bencana (sebagai program utama);
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (sebagai program pendukung).

Adapun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba pada 2026 sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba membutuhkan dana sebesar Rp. 4.174.881.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta

delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan besaran anggaran yang dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.33 berikut (terlampir).

Lampiran V

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Toba

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.174.881.000				4.393.626.000
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.174.881.000				4.393.626.000
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	3.795.891.000			100 Persen	3.905.290.000
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	8.000.000			100 Persen	11.000.000
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	8.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	11.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		100 Persen	3.146.781.000			100 Persen	3.173.252.000
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang/Bulan	3.146.781.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang/Bulan	3.173.252.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum		100 Persen	188.000.000			100 Persen	251.120.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	5.000.000
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	48.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	49.000.000
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	10.000.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	25.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	26.000.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	161.120.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur		100 Persen	233.280.000			100 Persen	242.940.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	30.060.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	203.280.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	212.880.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		100 Persen	219.830.000			100 Persen	226.978.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	214.830.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Unit	216.978.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	10.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat, Persentase Penanganan Pasca Bencana		100 Persen	378.990.000			100 Persen	488.336.000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		100 Persen	175.720.000			100 Persen	130.000.000
1	05	03	2.02	0015	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kawasan	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Unit	80.000.000
1	05	03	2.02	0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		155 Orang	-
1	05	03	2.02	0020	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kawasan	25.720.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Kawasan	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Persen	103.270.000			100 Persen	208.336.000
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	53.270.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	158.336.000
1	05	03	2.03	0012	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	50.000.000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 Persen	100.000.000			100 Persen	150.000.000
1	05	03	2.04	0010	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Kegiatan	50.000.000
1	05	03	2.04	0011	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kegiatan	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga	100.000.000
TOTAL									4.174.881.000				4.393.626.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dengan tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2026 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Toba. Ada 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.174.881.000,00 yang digunakan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

KODE			PROGRAM	KEBUTUHAN DANA
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.795.891.000,00
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 378.990.000,00
TOTAL				Rp. 4.174.881.000,00

Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan BPBD Kabupaten Toba pada tahun 2026 sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. Program Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan:
- a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota

c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

2. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba merupakan salah satu perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kategori pencapaian SPM Kebencanaan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
		10	Respon cepat darurat bencana
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Berdasarkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yaitu *Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba pada tahun 2026 adalah ***Indeks Ketahanan Daerah***.

Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) akan meningkatkan ketangguhan terhadap bencana karena IKD mengukur kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu *Hazard* (ancaman/bahaya), *Vulnerability* (kerentanan) dan *Capacity* (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (*Hazard*) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (*Vulnerability*) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah indeks komposit yang mengukur tingkat resiliensi suatu wilayah berdasarkan kapasitasnya untuk memitigasi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. IKD digunakan untuk mengukur kemampuan penanggulangan bencana di tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dan menjadi acuan penting untuk perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71

Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (evidence) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Adapun score IKD yaitu:

- Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah),
- Nilai 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan
- Nilai 0,8 s.d 1 (tinggi).

Pada tahun 2026 target Indeks Ketahanan Daerah yaitu 0,40 (sedang).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan.

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.

Pendanaan indikatif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba pada Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran rencana pendanaan dari sipd.ri.kemendagri.go.id berikut:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						4.174.881.000,00							4.393.626.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.174.881.000,00							4.393.626.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.174.881.000,00							4.393.626.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	3.795.891.000,00						-	3.905.290.000,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	85,00	73.50	77.50	79,70	3.795.891.000,00	-	-	-	-	-	-	3.905.290.000,00	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	8.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	-	11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	3.146.781.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	-	3.173.252.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.146.781.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		3.173.252.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	-			100 Persen	188.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	-	251.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	48.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		49.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		161.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	-			100 Persen	233.280.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	-	242.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		30.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	203.280.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		212.880.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 Persen	219.830.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	-	226.978.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	214.830.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		216.978.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Bencana Darurat, Persentase Penanganan Pasca Bencana	-			100 Persen	378.990.000,00						-	488.336.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana]	Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase penanganan pra bencana Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100	0 100	0 100	100	378.990.000,00	-	-	-	-	-	-	488.336.000,00	-
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-			100 Persen	175.720.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat	-	130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	25.720.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100 Persen	103.270.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat	-	208.336.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	53.270.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		158.336.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>				20 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	JUMLAH							4.174.881.000,00							4.393.626.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Toba memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya pembangunan Kabupaten Toba yang sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Toba.

Dalam menunjang kelancaran perencanaan pembangunan daerah secara operasional akan memiliki acuan yang jelas dan tegas, diantaranya dengan merencanakan beberapa program kegiatan, sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam perencanaannya. Dengan demikian, output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah program tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba ini disusun sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba untuk tahun 2026 dan sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada tahun berikutnya. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas

pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada umumnya dalam proses formulasi, implementasi dan monitoring serta evaluasi sistem perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel menuju *"TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya"*. Oleh karena itu dokumen Rencana Kerja ini hendaknya menjadi daya picu meningkatkan kinerja dan perencanaan yang lebih baik tahun 2026.

Balige,

2025

Plt. Kepala Pelaksana**Badan Penanggulangan Bencana Daerah****Kabupaten Toba****Robert Manurung, SH****Pembina Tingkat I (IV/b)****NIP. 19690227 199402 1 001**